



LKj

Laporan Kinerja TAHUN 2025



 [disdik_banjarmasin](https://www.instagram.com/disdik_banjarmasin)

 disdik.banjarmasin.go.id

DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 29 Banjarmasin 70231

Posel : disdik_bjm@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan izin Nya jualah maka dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan good governance, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Adapun kinerja yang diharapkan tercantum dalam Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam upaya mewujudkan good governance.

Banjarmasin, 29 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin



RYAN UTAMA, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19820427 200112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi	3
C. Permasalahan Utama	11
D. Sistematika Penulisan LKj	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	19
2.2 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	20
2.3 Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Capaian Kinerja Organisasi	43
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	44
2. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	67
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya	67
4. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2025	68
B. Realisasi Anggaran	71
BAB IV PENUTUP	73
Lampiran-Lampiran	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan	7
Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan	8
Tabel 1.3 Jumlah Sekolah PAUD Negeri dan Swasta	8
Tabel 1.4 Jumlah Tenaga Pendidik PAUD Negeri dan Swasta	8
Tabel 1.5 Jumlah Sekolah Pada Jenjang Sekolah Dasar.....	9
Tabel 1.6 Jumlah Tenaga Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar.....	9
Tabel 1.7 Jumlah Sekolah Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	9
Tabel 1.8 Jumlah Tenaga Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	10
Tabel 1.9 Jumlah Penduduk Usia Sekolah dan Jumlah Siswa pada Satuan Pendidikan	10
Tabel 1.10 Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas	10
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2021 – 2026	22
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2025 - 2029.....	28
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 2021-2026	30
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) 2025-2029	31
Tabel 2.5 Program dan Pagu Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	35
Tabel 3.1 Kategori Nilai Capaian untuk Persentase Pencapaian Sasaran	38
Tabel 3.2 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2021 - 2026	39
Tabel 3.3 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2025 - 2029	42
Tabel 3.4 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.1	44
Tabel 3.5 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.2	45
Tabel 3.6 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.3	45
Tabel 3.7 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.4	46
Tabel 3.8 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.5	47
Tabel 3.9 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.6	48
Tabel 3.10 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.7	48
Tabel 3.11 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.8	49
Tabel 3.12 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.1	50
Tabel 3.13 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.2	52
Tabel 3.14 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.3	53

Tabel 3.15 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.4	54
Tabel 3.16 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1	55
Tabel 3.17 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 2	56
Tabel 3.18 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 3	57
Tabel 3.19 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 4	59
Tabel 3.20 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 5	60
Tabel 3.21 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 6	61
Tabel 3.22 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 7	62
Tabel 3.23 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 8	63
Tabel 3.24 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 10	64
Tabel 3.25 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 11	65
Tabel 3.26 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 12	66
Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target RPJMD Tahun 2025	67
Tabel 3.28 Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2025	72

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan program prioritas untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, handal, cakap dan kompeten dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan secara menyeluruh. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Akses pendidikan yang mudah, murah dan terjangkau, serta pendidikan yang berkualitas akan membuat warga masyarakat memiliki kecakapan hidup (*life skills*) yang akan menjadi pendorong serta tumpuan tegaknya pembangunan manusia seutuhnya yang pada gilirannya akan mampu mewujudkan masyarakat maju, mapan dan sejahtera yang dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa, karenanya kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan pendidikannya. Keyakinan tersebut telah diyakini oleh bangsa Indonesia. Namun kenyataannya sistem pendidikan Indonesia belum menunjukkan keberhasilan yang baik. Bidang pendidikan menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas bangsa. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin merupakan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu : 1) Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; 2) Satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna, diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; 3) Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; 4) Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan 5) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Kantor Dinas Pendidikan sebagai organisasi perangkat daerah yang mengemban amanat dan tanggung jawab melaksanakan tujuan dan fungsi pendidikan tersebut, harus mewujudkan pelaksanaan kinerja dan penerapan mekanisme pertanggung-jawaban dari masing-masing program dan kegiatan yang tepat, jelas dan terukur sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap terciptanya good governance. Selanjutnya melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menyusun Laporan Kinerja yang merupakan wujud pertanggung-jawaban pelaksanaan kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin 2025-2029.

B. Gambaran Umum Organisasi

1) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kedudukan

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Pendidikan yang meliputi Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengelolaan Layanan dan Pembinaan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan termasuk Pendidikan Luar Sekolah, Peningkatan Mutu Pendidikan serta pengendaliannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin.

c. Fungsi

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Pendidikan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan sekolah dasar;

5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan sekolah menengah pertama;
6. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
7. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

2) Struktur Organisasi

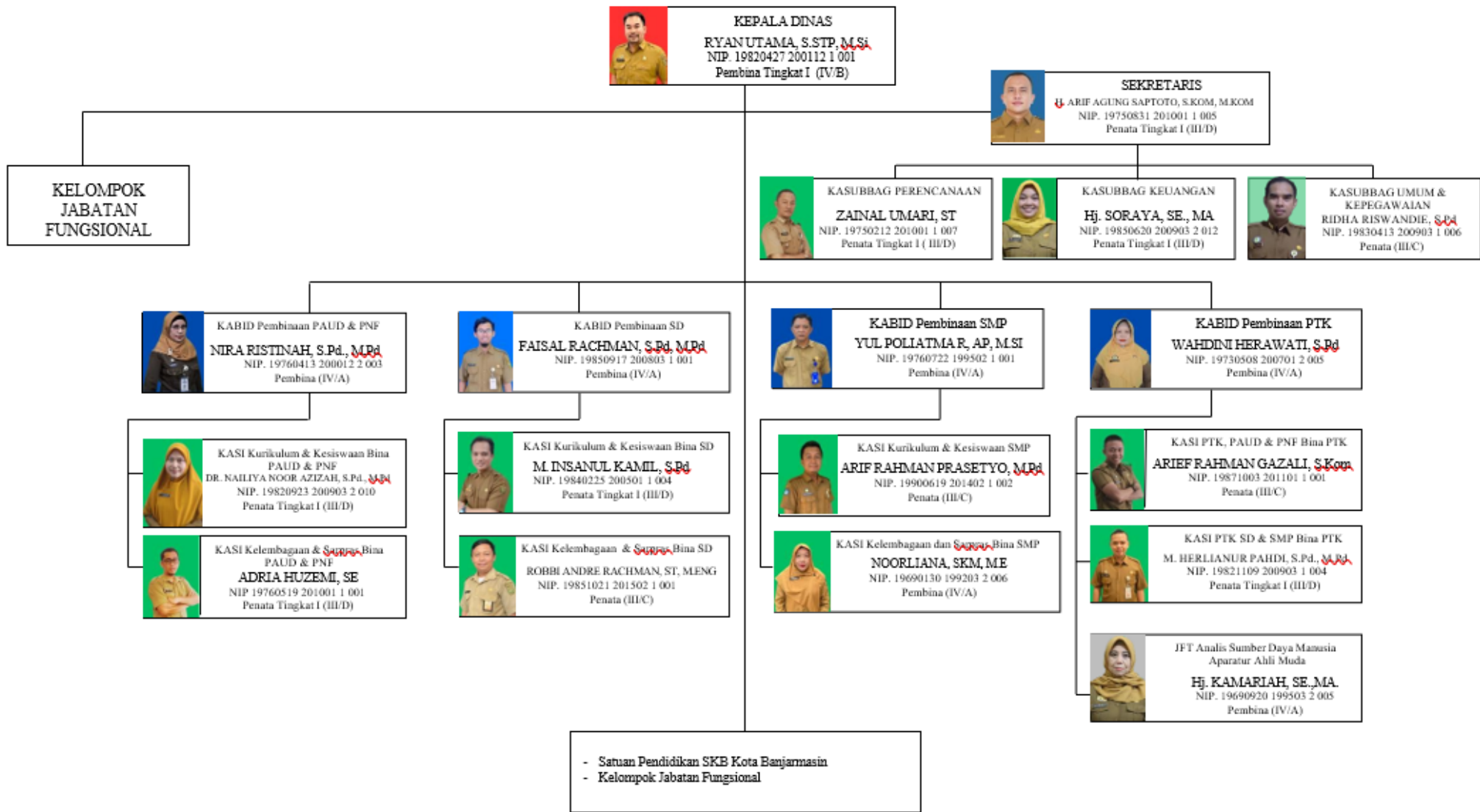
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai Struktur Organisasi yang telah ditetapkan, didukung ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan serta sistem prosedur yang baku, maka Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas:

1. Kepala Dinas (Eselon IIb)
2. Sekretaris (Eselon IIIa)
 - a. Sub Bagian Perencanaan (Eselon IVa);
 - b. Sub Bagian Keuangan (Eselon IVa);
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IVa).
3. Bidang Pembinaan Pendidikan PAUD dan PNF (Eselon IIIb)
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan (Eselon IVa);
 - b. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana (Eselon IVa).
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (Eselon IIIb)
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan (Eselon IVa);
 - b. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana (Eselon IVa).
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (Eselon IIIb)
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan (Eselon IVa);
 - b. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana (Eselon IVa).
6. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Eselon IIIb)

- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Eselon IVa);
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Eselon IVa).
7. Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Tipe A (Perwali No. 63 Tahun 2024)





3) Sumber Daya Manusia

a. Keadaan Pegawai

Jumlah ASN di Dinas Pendidikan kota Banjarmasin (tidak termasuk pengawas dan guru) sampai dengan Bulan Desember 2025 sebanyak 83 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi yang tersebar pada Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP dan Bidang PTK. Pegawai tersebut memiliki latar belakang yang dapat klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat. Adapun jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat dipaparkan pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
1.	Golongan IV	10	orang
2.	Golongan III	59	orang
3.	Golongan II	14	orang
4.	Golongan I	-	orang
Jumlah		83	orang

Sumber: Dinas Pendidikan

Tabel 1.2
Klasifikasi Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
1	S 3	1	orang
2	Strata 2	14	orang
3	Strata 1	38	orang
4	D 2	-	orang
5	Sarjana Muda / D III	13	orang
	SMA	17	orang
	Jumlah Total	83	orang

Sedangkan jumlah tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sebanyak 6272 orang.

Tabel 1.3
Jumlah Sekolah PAUD Negeri dan Swasta

No	Kecamatan	Status Sekolah		Total
		Negeri	Swasta	
1	Banjarmasin Barat	4	68	72
2	Banjarmasin Selatan	3	93	96
3	Banjarmasin Tengah	6	84	90
4	Banjarmasin Timur	6	84	90
5	Banjarmasin Utara	6	110	116
Total		25	439	464

Sumber data: <https://datadik.kemendikdasmen.go.id/>

Tabel 1.4
Jumlah Tenaga Pendidik PAUD Negeri dan Swasta

No	Kecamatan	Status Sekolah		Total
		Negeri	Swasta	
1	Banjarmasin Barat	13	186	199
2	Banjarmasin Selatan	8	277	285
3	Banjarmasin Tengah	22	224	246
4	Banjarmasin Timur	29	277	306
5	Banjarmasin Utara	17	317	334
Total		89	1281	1.370

Sumber data: <https://datadik.kemendikdasmen.go.id/>

Tabel 1.5
Jumlah Sekolah Pada Jenjang Sekolah Dasar

No	Kecamatan	Status Sekolah		Total
		Negeri	Swasta	
1	Banjarmasin Barat	42	6	48
2	Banjarmasin Selatan	59	17	76
3	Banjarmasin Tengah	26	16	42
4	Banjarmasin Timur	40	5	45
5	Banjarmasin Utara	41	9	50
Total		208	53	261

Sumber data: <https://datadik.kemendikdasmen.go.id/> /

Tabel 1.6
Jumlah Tenaga Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar

No	Kecamatan	Status Sekolah		Total
		Negeri	Swasta	
1	Banjarmasin Barat	502	84	586
2	Banjarmasin Selatan	644	255	899
3	Banjarmasin Tengah	386	232	618
4	Banjarmasin Timur	550	41	591
5	Banjarmasin Utara	527	141	668
Total		2.609	753	3.362

Sumber data: <https://datadik.kemendikdasmen.go.id/> /

Tabel 1.7
Jumlah Sekolah Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama

No	Kecamatan	Status Sekolah		Total
		Negeri	Swasta	
1	Banjarmasin Barat	5	7	12
2	Banjarmasin Selatan	7	3	10
3	Banjarmasin Tengah	6	11	17
4	Banjarmasin Timur	7	1	8
5	Banjarmasin Utara	10	5	15
Total		35	27	62

Sumber data: <https://datadik.kemendikdasmen.go.id/> /

Tabel 1.8
Jumlah Tenaga Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama

No	Kecamatan	Status Sekolah		Total
		Negeri	Swasta	
1	Banjarmasin Barat	165	63	228
2	Banjarmasin Selatan	189	49	238
3	Banjarmasin Tengah	245	114	359
4	Banjarmasin Timur	213	3	216
5	Banjarmasin Utara	270	64	334
Total		1.082	293	1.375

Sumber data: [https://datadik.kemendikdasmen.go.id/ /](https://datadik.kemendikdasmen.go.id/)

b. Keadaan Penduduk Usia Sekolah dan Siswa

Tabel 1.9
Jumlah Penduduk Usia Sekolah dan Jumlah Siswa
pada Satuan Pendidikan

Penduduk Usia Sekolah		Keadaan Siswa	
Usia	Jumlah	Satuan Pendidikan	Jumlah
5-6 Tahun	21.744	PAUD usia 5-6 Tahun	15.875
7-12 Tahun	68.286	SD + Paket A	63.387
13-15 Tahun	35.809	SMP + Paket B	28.620

Sumber data penduduk: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Tahun 2025

Sumber data siswa: [https://datadik.kemendikdasmen.go.id/ /](https://datadik.kemendikdasmen.go.id/)

4) Sarana dan Prasarana

Jumlah Sekolah, Rombongan Belajar dan Ruang Kelas

Tabel 1.10
Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi Ruang Kelas		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang / Berat
PAUD	464	1.015	1.424	796	376	252

SD+SDS	261	2.302	2.356	1.110	582	664
SMP+SMPS	62	742	885	453	154	278

Sumber data: [https://datadik.kemendikdasmen.go.id/ /](https://datadik.kemendikdasmen.go.id/)

C. Permasalahan Utama

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi, tetapi ikut mempengaruhi kinerja organisasi dalam merumuskan langkah-langkah yang strategis. Oleh karenanya, analisis masalah lingkungan internal dan eksternal sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen terkait, terutama bagaimana memetakan kebijakan agar sinkron dengan kondisi dan tingkat kepentingan.

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sebagai organisasi juga menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Oleh karenanya diperlukan analisis masalah lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

a. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah gambaran tentang kelemahan sebagai masalah internal dan kekuatan sebagai potensi-potensi dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang mempengaruhi terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Lingkup analisis berkaitan dengan aspek-aspek yang menjadi kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin. Dalam upaya untuk mencapai Angka Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 10,36 Tahun pada tahun 2025, Pemerintah Kota Banjarmasin telah membuat kebijakan. Kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin pada urusan pendidikan meliputi: a) Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan, b) Peningkatan pemerataan akses layanan Pendidikan di

semua jenjang, dan c) Peningkatan tata kelola pembangunan Pendidikan, strategi pembiayaan dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan ketiga kebijakan tersebut dapat dianalisis sebagai berikut.

1. Kelemahan

a) Kelemahan pada Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan

- 1) Belum semua penduduk usia sekolah menikmati layanan pendidikan yang berkualitas,
- 2) Belum semua satuan pendidikan memenuhi standar kualitas layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 3) Belum semua guru memenuhi kualifikasi S1.
- 4) Belum semua satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka.

b) Kelemahan pada Peningkatan pemerataan akses layanan Pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar

- 1) Belum semua satuan pendidikan memenuhi standar kualitas sarana prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 2) Masih terjadi disparitas akses layanan antara sekolah antar wilayah di Kota Banjarmasin, terutama perbedaan akses layanan sekolah antara sekolah di wilayah kota dengan di wilayah pinggiran. Hal ini menunjukkan belum meratanya kualitas layanan antara wilayah satu dengan wilayah lain di Kota Banjarmasin. Dampak dari belum meratanya layanan sekolah antar wilayah adalah:
 - ✓ terjadi konsentrasi atau tumpukan warga Kota Banjarmasin ke beberapa sekolah tertentu yang mudah akses layanannya.
 - ✓ kemacetan lalu lintas karena masyarakat dari berbagai wilayah menuju ke sekolah pada wilayah yang sama.

- ✓ kesulitan pemerintah daerah mengatur distribusi tenaga pendidik secara merata karena jumlah tenaga pendidik yang terbatas.

Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah pemerataan akses layanan sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menetapkan system zonasi saat melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta melakukan pengangkatan PPPK didukung dengan pemetaan dan pendistribusian pendidik.

- 3) Belum semua satuan Pendidikan yang menerapkan akses layanan informasi berbasis teknologi sebagai usaha pemerataan akses dalam pelayanan.

c) Peningkatan tata kelola pembangunan Pendidikan, strategi pembiayaan dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan

- 1) Belum semua guru menikmati tunjangan sertifikasi.
- 2) Rendahnya kemampuan satuan pendidikan dalam menerapkan Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anakm Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana diamanahkan dalam Permendikbudristek No 9 Tahun 2024. Faktor-faktor penyebab masalah ini antara lain:
 - ✓ Rendahnya kemampuan sumber daya dalam melakukan evaluasi system Pendidikan dalam bentuk analisis data satuan Pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang dapat digunakan sebagai penyusunan strategi pembiayaan dan peningkatan efektivitas dalam penganggaran Pendidikan.
 - ✓ rendahnya kemampuan kepala sekolah dalam menerapkan sistem pengelolaan data dan informasi mutu pendidikan yang lengkap, akurat, terkini serta cepat dan mudah diakses.

- ✓ rendahnya kemampuan kepala sekolah dalam menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berbasis data dan informasi mutu pendidikan sesuai dengan SPM dan SNP.
- ✓ rendahnya kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dalam menyediakan data dan informasi yang akurat, lengkap dan terkini.
- ✓ rendahnya kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan program dan kegiatan.

c. Analisis Lingkungan Eksternal :

1) Sosial

Ketidakmampuan mengelola dan mengikuti dinamika perubahan sosial. Dengan berkembangnya media sosial berbasis teknologi informasi dan komunikasi tentu mempengaruhi cara kerja, berperilaku dan bersosial. Jika tidak dapat mengikuti perkembangan, maka kemampuan pengelolaan yang efisiensi dan efektifitas akan semakin tertinggal. Dengan demikian harus menjadi agenda penting untuk mengikuti perubahan sosial dalam pemikiran pendidikan nasional. Dan juga masih kurangnya pendidikan orang tua dalam pengasuhan anak (*parenting education*).

2) Ekonomi

Dalam rangka mencapai prestasi belajar anak sudah barang tentu harus ditunjang oleh berbagai sarana dan media belajar terutama dalam rumah tangga. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan belajar anak harus ditunjang oleh kecukupan dan kemantapan ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga termasuk salah satu faktor keberhasilan dan kegagalan pendidikan bagi anak.

3) Budaya

Era digital telah memasuki semua lini kehidupan setiap orang. Dengan *Hand Phone (HP)*, dunia yang luas ini ada dalam genggaman tangan. Semua budaya dari seluruh penjuru dunia dapat mempengaruhi setiap budaya masyarakat lain termasuk masyarakat Indonesia. Perubahan budaya tidak dapat dielakkan. Salah satu budaya yang paling sederhana, dapat dilihat pada permasalahan perasaan malu. Jika dulu perasaan malu dominan dalam kehidupan masyarakat, namun kini perasaan tersebut semakin menipis dan menguap, sehingga melicinkan mereka untuk melakukan hal-hal yang semula di pandang kurang bahkan tidak pantas. Di antara pengaruh dunia Barat yang tertanam pada bangsa kita, khususnya anak usia sekolah.

4) Globalisasi

Arus globalisasi di bidang ilmu pengetahuan, informasi dan telekomunikasi telah mempengaruhi konsentrasi belajar peserta didik dan masih tersita waktu belajar pada saat di rumah yang seharusnya mengulangi pelajaran di sekolah. Globalisasi mengandung arti terintegrasinya kehidupan nasional ke dalam kehidupan global. Dalam bidang ekonomi, misalnya, globalisasi ekonomi berarti terintegrasinya ekonomi nasional ke dalam ekonomi dunia atau global. Bila dikaitkan dalam bidang pendidikan, globalisasi pendidikan berarti terintegrasinya pendidikan nasional ke dalam pendidikan dunia. Sebegitu jauh, globalisasi memang belum merupakan kecenderungan umum dalam bidang pendidikan.

D. Sistematika Penulisan LKj

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2025 adalah:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Disajikan gambaran singkat mengenai : Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja. Isi yang dipaparkan mencakup sasaran yang ingin diraih SKPD dalam tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

A. Rencana Strategis

Uraian singkat tentang Rencana Strategis, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program SKPD

B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Berisi mengenai ada atau tidaknya perbedaan antara target kinerja pada Rencana Kinerja dengan Perjanjian Kinerja terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut, serta indikator keberhasilan pencapaiannya, termasuk indikator Kinerja Utama masing-masing SKPD dan Indikator Kinerja tiap-tiap Program/kegiatan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran Strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas keuangan dipaparkan pada akhir bab ini dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian sasaran SKPD.

1. Alasan anggaran dan realisasi belanja

Berisi alokasi anggaran dan realisasi belanja, serta alasan yang menjelaskan mengapa jumlah realisasi belanja sesuai/tidak dengan alokasi anggaran.

2. Efisiensi sumber daya

Berisi perhitungan efisiensi anggaran program dan kegiatan, serta alasan yang menjelaskan mengapa terjadi efisiensi/tidak efisiensi.

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Berisi jumlah sisa lebih perhitungan anggaran yang dikembalikan ke kas daerah, alasan terjadinya sisa, serta kemungkinan penggunaan sisa tersebut.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

2.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Dalam rangka menunjang akuntabilitas Pemerintah Kota Banjarmasin, sebelum menetapkan Visi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terlebih dahulu dikembangkan Visi Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu **”Terwujudnya Kota Banjarmasin Maju dan Sejahtera”**

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin selaku penanggung jawab sistem pendidikan di Kota Banjarmasin memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Misi ke-1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029, yaitu ***Menciptakan Generasi Penerus yang Sehat, Cerdas, dan Berkarater.***

Misi ini nantinya mengarah pada kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kota Banjarmasin agar semakin sehat dan cerdas. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Pembangunan yang berlangsung di Kota Banjarmasin akan memperhatikan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan dasar dalam peningkatan daya saing sumber daya manusia. Aspek pendidikan dan kesehatan yang tentunya berkualitas merupakan poin utama yang harus dipenuhi agar sumber daya manusia di Kota Banjarmasin mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia bahkan secara global. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan menciptakan masyarakat Kota Banjarmasin yang semakin sejahtera di masa depan. Misi tersebut selanjutnya disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada.

2.1.1 Prinsip Layanan Dinas Pendidikan

IQRA

I: INTEGRITY (Integritas)

Insan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mampu berperilaku kerja yang memegang teguh secara utuh akan prinsip kejujuran, kewibawaan, adab dan bertindak benar serta selalu konsisten dalam mempertahankannya.

Q: QUALITY (Kualitas)

Insan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin lebih mengutamakan kualitas atau mutu kerja terbaik dalam setiap layanan publik yang diberikan.

R: RESPONSIBILITY (Bertanggung Jawab)

Insan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dengan amanah dan penuh rasa tanggung jawab bekerja dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sesuai dengan apa yang diembankan kepadanya.

A: ACCOUNTABILITY (Akuntabilitas)

Insan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan prinsip keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya SKPD yang baik dan terpercaya.

2.2 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banjarmasin telah direvisi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 106 Tahun 2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Banjarmasin periode Tahun 2021 – 2026 dan periode 2025 – 2029 sebagai acuan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk:

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan kinerja tahunan;
- c. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja;

- d. Evaluasi kinerja
- e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2025 periode tahun 2021 – 2026 :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2021 - 2026

9 — Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan						
No	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Nilai LHE AKIP Dinas Pendidikan	Hasil LHE AKIP Dinas Pendidikan	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	Inspektorat	Kepala Dinas Pendidikan
19 — Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan						
No	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	APK PAUD/ sederajat = Jumlah Peserta Didik Jenjang PAUD sederajat / jumlah penduduk usia 5 sampai 6 tahun di Kota bersangkutan	Jumlah Peserta Didik Jenjang PAUD sederajat dibagi jumlah penduduk usia 5 sampai 6 tahun di Kota bersangkutan	%	BPS	Kepala Dinas Pendidikan
2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ sederajat	APK SD/MI/ sederajat = Jumlah Peserta Didik Jenjang SD sederajat / jumlah penduduk usia 7 sampai 12 tahun di Kota bersangkutan	Jumlah Peserta Didik Jenjang SD sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7 sampai 12 tahun di Kota bersangkutan	%	BPS	Kepala Dinas Pendidikan
82 — Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan						
No	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab

1	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ sederajat	APK SMP/MTs/ sederajat = Jumlah Peserta Didik Jenjang SMP sederajat / jumlah penduduk usia 13 sampai 15 tahun di Kota bersangkutan	Jumlah Peserta Didik Jenjang SMP sederajat dibagi jumlah penduduk usia 13 sampai 15 tahun di Kota bersangkutan	%	BPS	Kepala Dinas Pendidikan
119 — Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan						
No	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Angka Partisipasi Murni PAUD	APM PAUD = (JUmlah murid PAUD usai 3-6 tahun dibagi Jumlah penduduk usia 3-6 tahun)*100%	APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah PAUD yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan pada jenjang PAUD. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah PAUD dapat bersekolah tepat waktu.	%	BPS	Kepala Dinas Pendidikan
2	Angka Partisipasi Murni SD/MI/ sederajat	APM SD = (JUmlah murid SD usai 7-12 tahun dibagi Jumlah penduduk usia 7-12 tahun)*100%	APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah SD yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan pada jenjang SD. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah SD dapat bersekolah tepat waktu.	%	BPS	Kepala Dinas Pendidikan
3	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ sederajat	APM SMP = (JUmlah murid SMP usai 16-18 tahun dibagi Jumlah penduduk usia 16-18 tahun)*100%	APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah SMP yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan pada jenjang SMP. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah SMP dapat bersekolah tepat waktu.	%	BPS	Kepala Dinas Pendidikan
243 — Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan						
No	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Angka rata-rata lama sekolah	Formulasi perhitungan oleh BPS	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.	Tahun	BPS	Kepala Dinas Pendidikan

247 — Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan						
No	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Akreditasi sekolah min. B SD/MI	(Jumlah sekolah jenjang SD Akreditasi minimal B dibagi dengan seluruh sekolah jenjang SD)*100%	Persentase sekolah jenjang SD yang memiliki akreditasi minimal B	%	Dapodik	Kepala Dinas Pendidikan
250 — Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan						
No	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Akreditasi sekolah min. B SMP/MTs	(Jumlah sekolah jenjang SMP Akreditasi minimal B dibagi dengan seluruh sekolah jenjang SMP)*100%	Persentase sekolah jenjang SMP yang memiliki akreditasi minimal B	%	Dapodik	Kepala Dinas Pendidikan
252 — Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan						
No	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan	(Realisasi pencapaian SPM Pendidikan dibagi target pencapaian SPM Pendidikan)*100%	Persentase pemenuhan SPM bidang pendidikan sesuai Permendikbud Nomor32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	%	Laporan SPM Kepmendagri	Kepala Dinas Pendidikan
651 — Meningkatnya Mutu dan relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin						
No	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Rasio Guru Murid Jenjang PAUD	Jumlah guru jenjang PAUD berbanding dengan jumlah murid jenjang PAUD	Berdasarkan Permendikbud no 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Rasio ideal Guru Terhadap Murid Jenjang PAUD dengan anak didik berusia 4-6 Tahun, yakni untuk jenjang Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK), Rasio guru dan anak maksimal	-	Dapodik	Kepala Dinas Pendidikan

			1:15. Artinya, satu orang guru KB ataupun TK sebaiknya tidak melayani lebih dari 15 orang anak didik.			
652 — Meningkatnya Mutu dan relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin						
No	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Rasio Guru Murid Jenjang SD	Jumlah guru jenjang SD berbanding dengan jumlah murid jenjang SD	Berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah standar Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang SD maka jumlah maksimum yang diajarkan oleh satu guru adalah 28 peserta didik.	-	Dapodik	Kepala Dinas Pendidikan
653 — Meningkatnya Mutu dan relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin						
No	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Rasio Guru Murid Jenjang SMP	Jumlah guru jenjang SMP berbanding dengan jumlah murid jenjang SMP	Berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah standar Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang SMP maka jumlah maksimum yang diajarkan oleh satu guru adalah 32 peserta didik.	-	Dapodik	Kepala Dinas Pendidikan
654 — Meningkatnya Mutu dan relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin						
No	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Rasio Sekolah Murid Jenjang PAUD	Jumlah sekolah jenjang PAUD berbanding jumlah peserta didik jenjang PAUD	Perbandingan jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik pada jenjang tertentu	-	Dapodik	Kepala Dinas Pendidikan
655 — Meningkatnya Mutu dan relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin						
No	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab

1	Rasio Sekolah Murid Jenjang SD	Jumlah sekolah jenjang SD berbanding jumlah peserta didik jenjang SD	Perbandingan jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik pada jenjang tertentu	-	Dapodik	Kepala Dinas Pendidikan
656 — Meningkatnya Mutu dan relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin						
No	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Rasio Sekolah Murid Jenjang SMP	Jumlah sekolah jenjang SMP berbanding jumlah peserta didik jenjang SMP	Perbandingan jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik pada jenjang tertentu	-	Dapodik	Kepala Dinas Pendidikan
657 — Meningkatnya Mutu dan relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin						
No	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Persentasi Guru bersertifikat pendidik (%)	(Jumlah guru ASN bersertifikat pendidik pada jenjang SD dan SMP disekolah negeri dan swasta dibagi Jumlah seluruh guru ASN ada jenjang SD dan SMP disekolah negeri dan swasta)*100%	Persentase jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik pada jenjang SD dan SMP	-	Dapodik	Kepala Dinas Pendidikan
658 — Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang						
No	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya pendayagunaan TIK untuk pendidikan (%)	(Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan TIK pada jenjang SD dan SMP dibagi seluruh pendidik ASN pada sekolah negeri jenjang SD dan SMP)*100%	Persentase peningkatan pendayagunaan TIK untuk pendidikan jenjang SD dan SMP	-	Bidang terkait	Kepala Dinas Pendidikan
659 — Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang						

No	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Persentase pemerataan kuantitas pendidik bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal (%)	(Jumlah seluruh guru pada seluruh jenjang pendidikan dibagi jumlah rombel)*100	Sebaran pendidik pada satuan pendidikan	-	Dapodik	Kepala Dinas Pendidikan

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2025 periode tahun 2025 – 2029 :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2025 – 2029

5216 — Meningkatnya kualitas layanan pendidikan						
No	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah penduduk usia 7–15 tahun yang mengikuti pendidikan dasar÷Total penduduk usia 7–15 tahun×100	Proporsi warga negara Indonesia usia 7–15 tahun yang sedang mengikuti pendidikan dasar (SD dan SMP/ sederajat) pada tahun tertentu dibandingkan dengan total populasi usia 7–15 tahun di wilayah tersebut.	Persentase	Dapodik, BPS	Dinas Pendidikan
2	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, iklim keamanan sekolah, inklusivitas, dan kebhinekaan pada kategori baik	jumlah satuan pendidikan dengan indeks kategori baik dibagi total satuan pendidikan yang dinilai kali 100%	Indikator ini mengukur persentase sekolah yang telah memenuhi standar dalam tiga aspek utama	Persentase	Survei Lingkungan Belajar (Asesmen Nasional – Kemendikbudristek) Dapodik Kemendikbudristek Hasil evaluasi mutu pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin (bekerja sama dengan LPMP/Kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalsel) raport pendidikan	dinas pendidikan
3	Persentase pemenuhan SPM pendidikan	Satuan Pendidik yang memenuhi SPM dibagi total satuan pendidikan dikali 100%	Persentase satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan sesuai dengan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Layanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal. Aspek yang dinilai meliputi: Ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dasar. Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kualifikasi. Ketersediaan sarana prasarana minimal. Pemenuhan pembiayaan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan daerah. Layanan khusus untuk peserta didik dari keluarga miskin dan berkebutuhan khusus.	Persentase	Dapodik, Laporan Evaluasi SPM	Dinas Pendidikan
5218 — Meningkatnya Mutu pendidikan						
No	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab

1	Rata-rata nilai literasi dan numerasi peserta didik jenjang SD/SMP	Nilai Rata-rata Literasi & Numerasi samadengan Total skor literasi + numerasi peserta didik dibagi Jumlah peserta didik yang mengikuti ANBK	Indikator ini mengukur capaian kompetensi dasar peserta didik jenjang SD dan SMP pada aspek literasi membaca serta numerasi (berhitung dan pemecahan masalah). Nilai diambil dari hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang dilaksanakan setiap tahun.	Skor	rapor pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Persentase pendidik atau tenaga pendidikan yang mendapat sertifikasi	Jumlah pendidik/tenaga kependidikan bersertifikat dibagi Jumlah total pendidik/tenaga kependidikan dikali 100%	Persentase pendidik atau tenaga kependidikan yang mendapat sertifikasi adalah perbandingan antara jumlah pendidik atau tenaga kependidikan yang telah memiliki sertifikat pendidik/kompetensi dengan jumlah seluruh pendidik atau tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase	Persentase (%)	Dapodik, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek, Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian dan Berkelanjutan (SIM-PKB)	Dinas Pendidikan
3	Persentase lembaga PAUD dan PNF berkualitas	Jumlah lembaga PAUD/PNF terakreditasi minimal B dibagi Jumlah total lembaga PAUD/PNF terdaftar dikali 100%	Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) yang memenuhi standar mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) atau telah terakreditasi minimal B (baik) oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF (BAN PAUD dan PNF) terhadap total seluruh lembaga PAUD dan PNF yang terdaftar.	Persentase (%)	BAN PAUD dan PNF, Data Pokok Pendidikan (Dapodik PAUD-Dikmas),	Dinas Pendidikan
4	Persentase lembaga pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi minimal "B"	Jumlah total SD dan SMP terdaftarJumlah SD dan SMP terakreditasi minimal B	Persentase lembaga pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) yang telah memperoleh peringkat akreditasi minimal "B" dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dibandingkan dengan jumlah seluruh lembaga SD dan SMP yang terdaftar secara resmi pada periode tertentu.	Persentase (%)	BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah), Dapodik (Data Pokok Pendidikan)	Dinas Pendidikan
5	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah penduduk usia 7–15 tahun yang bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs dibagi Jumlah total penduduk usia 7–15 tahun dikali 100%	Persentase warga negara Indonesia berusia 7–15 tahun yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs, baik negeri maupun swasta) terhadap jumlah total penduduk usia 7–15 tahun pada wilayah dan periode tertentu.	Persentase (%)	Dapodik (Data Pokok Pendidikan), EMIS (Kemenag), Badan Pusat Statistik,	Dinas Pendidikan
6	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, iklim keamanan sekolah, inklusivitas, dan kebhinekaan pada kategori baik	Jumlah satuan pendidikan dengan indeks \geq kategori baik dibagi Jumlah total satuan pendidikan yang diukur dikali 100%	Persentase satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, atau sederajat) yang memiliki hasil pengukuran indeks karakter, iklim keamanan sekolah, inklusivitas, dan kebhinekaan dengan kategori "baik" atau lebih tinggi berdasarkan instrumen yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).	Persentase (%)	Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), Dapodik	Dinas Pendidikan

2.3 Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Dokumen Perjanjian kinerja lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dengan mengacu pada rencana strategis periode 2021-2026 dan rencana strategis periode 2025 - 2029 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dengan sumber daya anggaran yang ada. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	1.1.	Nilai LHE AKIP Dinas Pendidikan	90
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan	2.1.	Angka Partisipasi Kasar PAUD	88
		2.2.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ sederajat	100
3.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan	3.1.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ sederajat	100
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan	4.1.	Angka Partisipasi Murni PAUD	75
		4.2.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/ sederajat	100
		4.3.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ sederajat	78

5.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan	5.1.	Angka rata-rata lama sekolah	0
6.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan	6.1.	Akreditasi sekolah min. B SD/MI	0
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan	7.1.	Akreditasi sekolah min. B SMP/MTs	0
8.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan	8.1.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan	0
9.	Meningkatnya Mutu dan relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin	9.1.	Rasio Guru Murid Jenjang PAUD	9.00
10.	Meningkatnya Mutu dan relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin	10.1.	Rasio Guru Murid Jenjang SD	16.00
11.	Meningkatnya Mutu dan relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin	11.1.	Rasio Guru Murid Jenjang SMP	14.80
12.	Meningkatnya Mutu dan relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin	12.1.	Rasio Sekolah Murid Jenjang PAUD	42.00
13.	Meningkatnya Mutu dan relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin	13.1.	Rasio Sekolah Murid Jenjang SD	218.10
14.	Meningkatnya Mutu dan relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin	14.1.	Rasio Sekolah Murid Jenjang SMP	304.00
15.	Meningkatnya Mutu dan relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin	15.1.	Persentasi Guru bersertifikat pendidik (%)	100
16.	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	16.1.	Meningkatnya pendayagunaan TIK untuk pendidikan (%)	0
17.	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	17.1.	Persentase pemerataan kuantitas pendidik bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal (%)	100

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) 2025-2029

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1.	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1.1.	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	96,00
		1.2.	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, iklim keamanan sekolah, inklusivitas, dan kebhinekaan pada kategori baik	72,00
		1.3.	Persentase pemenuhan SPM pendidikan	74,00
2.	Meningkatnya Mutu pendidikan	2.1.	Rata-rata nilai literasi dan numerasi peserta didik jenjang SD/SMP	68,00
		2.2.	Persentase pendidik atau tenaga pendidikan yang mendapat sertifikasi	80,00
		2.3.	Persentase lembaga PAUD dan PNF berkualitas	0
		2.4.	Persentase lembaga pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi minimal "B"	91,00
		2.5.	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,00
		2.6.	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, iklim keamanan sekolah, inklusivitas, dan kebhinekaan pada kategori baik	70,00

Tahun 2025 ini merupakan tahun yang ke 5 pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2021 - 2026. Dan di tahun pertama pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2025 – 2029. Dalam pengukuran ini, metodologi yang digunakan adalah membandingkan capaian antar berbagai komponen sasaran, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran.

Untuk mewujudkan agenda kerja pemerintah daerah, maka perlu dituangkan dalam suatu wadah yang lebih mempertegas agenda tersebut yakni dalam bentuk program dan kegiatan. Program Pemerintah Kota Banjarmasin pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi serta penjabaran dari tugas pokok dan fungsi seluruh satuan kerja dalam menyukseskan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

Adapun program kegiatan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2025 ditinjau berdasarkan bidang pemerintahan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Urusan Wajib Bidang Pendidikan

1. Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tujuan : Mewujudkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah

Sasaran : Tercapainya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
- b. Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program : PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing

Sasaran : Tercapainya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan Pendidikan dasar

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

3. Program : PENGEMBANGAN KURIKULUM

Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing

Sasaran : Tercapainya peningkatan mutu dan relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

4. Program : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing

Sasaran : Tercapainya peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi Pendidikan di seluruh jenjang

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

5. Program : PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN

Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing

Sasaran : Tercapainya layanan perizinan pendidikan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
- b. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dalam mewujudkan Misi kedua seperti sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Banjarmasin yaitu *“Meningkatkan derajat kesehatan dan Pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia”* dengan pagu anggaran sebesar **Rp 724.002.835.794** dengan 5 Program Kegiatan. Pagu Anggaran tersebut terdiri dari 2 (dua) sumber pendanaan yaitu yang

bersumber dari APBN dan APBD adapun rinciannya bisa dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.2 Program dan Pagu Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

NO	PROGRAM	NILAI DPA (Rp)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	420.188.133.050
2	Program Pengelolaan Pendidikan	298.805.814.468
3	Program Pengembangan Kurikulum	2.686.458.000
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.001.598.400
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	320.831.876
Jumlah		724.002.835.794

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dalam semangat transparansi seperti itulah, Laporan Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2025 ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. IKU spesifik dan jelas (*Spesific*)
- b. IKU dapat diukur secara objektif (*Measurabel*)
- c. IKU dapat dicapai (*Achievabel*)
- d. IKU menggambarkan hasil (*Relevance*)
- e. IKU untuk kurun waktu tertentu (*Time Bound*)

Pengukuran kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, juga dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performa Dinas Pendidikan atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara

berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja Dinas Pendidikan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dilakukan pada dokumen ini adalah target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya pada akhir tahun 2025, target kinerja (*performance plan*) akan dibandingkan dengan realisasinya (*performance result*), sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Celah kinerja ini kemudian di analisis untuk diketahui penyebab ketidak-berhasilan dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada tahun anggaran 2025. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program/Kegiatan makro maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal disertai makna sebagaimana pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Kategori Nilai Capaian untuk Persentase Pencapaian Sasaran

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Nilai Capaian
I	$x > 85\%$	Sangat berhasil
II	$70\% \leq x \leq 85\%$	Berhasil
III	$55\% \leq x \leq 70\%$	Cukup Berhasil
IV	$x \leq 55\%$	Kurang Berhasil

Tabel 3.2 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA UTAMA		REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025				Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
					TARGET		REALISASI					
1		2		3	4		5		6	1	2	3
1.	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan di Kota Banjarmasin	1.1	Presentasi Guru bersertifikat pendidik	85,17	100	%	83	%	83%	83,00%	0%	75%
		1.2	Rasio Guru terhadap Murid jenjang PAUD	12	9,00	%	9,00	%	100%	100%	0%	100%
		1.3	Rasio Guru terhadap Murid jenjang SD	16,14	16,00	%	7,00	%	44%	44,00%	0%	44%
		1.4	Rasio Guru terhadap Murid jenjang SMP	15,65	14,80	%	6,00	%	41%	41,00%	0%	41%
		1.5	Rasio Sekolah terhadap Murid jenjang PAUD	40,75	42,00	%	32,71	%	78%	78,00%	0%	78%
		1.6	Rasio Sekolah terhadap Murid jenjang SD	209,1	218,10	%	192	%	88%	88,00%	0%	88%

		1.7	Rasio Sekolah terhadap Murid jenjang SMP	350,13	304,00	%	351	%	115%	110%	0%	110%	
		1.8	Harapan Lama Sekolah	14.01	14,01	Tahun	14,02	Tahun	100%	100%	0%	100%	
2.	Peningkatan dan Perluasan Akses Pendidikan yang bermutu di Kota Banjarmasin	2.1	Angka Partisipasi Kasar										
			- PAUD	105	88,00	%	83	%	94%	94%	0%	94%	
			- SD/MI	101	100,00	%	103,37	%	103%	103%	0%	103%	
			- SMP/MTs	108	100,00	%	102,46	%	102%	102%	0%	102%	
		2.2	Angka Partisipasi Murni									0%	0%
			- PAUD	101,1	75,00	%	59,17	%	79%	79%	0%	79%	
			- SD/MI	91,62	100,00	%	95,18	%	95%	95,00%	0%	95%	
			- SMP/MTs	78,72	78,00	%	81,84	%	105%	105,00%	0%	105%	
		2.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10.35	10,00	Tahun	10,36	Tahun	104%	104%	0%	104%	
			2.4	Persentasi Pencapaian Akreditasi B Sekolah								0%	0%

			- SD	98	64	%	90	%	141%	110%	0%	110%
			- SMP	98,38	91	%	100	%	110%	110%	0%	110%
		2.5	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan	83.11	100	%	81,14	%	81%	83,11%	0%	83%
3.	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dinas pendidikan	3.1	Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	BB	BB	nilai	BB	nilai	BB	110%	0%	110%
Total Capaian PK												1731%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK												82,42%
Predikat PKO												B

Tabel 3.3 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025				Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdsarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
			TARGET		REALISASI					
1		2	3		4		5	1	2	3
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan unggul dan merata	Harapan Lama Sekolah (HLS)	10.50	Tahun	14.02	Tahun	134%	110.00%	0%	99%
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	14.03	Tahun	10.36	Tahun	74%	74%	0%	74%
		Rapor Pendidikan Kota Banjarmasin	81.14	Persen	81.14	Persen	100%	100.00%	0%	100%
2.	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	96.00	Persen	88.13	Persen	92%	92%	0%	92%
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, iklim keamanan sekolah, inklusivitas, dan kebhinekaan pada kategori baik	72.00	Persen	75	Persen	104%	104%	0%	104%
		Persentase pemenuhan SPM pendidikan	74.00	Persen	81.14	Persen	110%	110%	0%	110%
		Rata-rata nilai literasi dan numerasi peserta didik jenjang SD/SMP	68.00	Skor	71.7	Skor	105%	105%	0%	105%
		Persentase pendidik atau tenaga pendidikan yang mendapat sertifikasi	80.00	Persen	83.00	Persen	104%	104%	0%	104%

		Persentase lembaga PAUD dan PNF berkualitas	0.00	Persen	0	Persen	0	0%	0%	0%
3.	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dinas pendidikan	Persentase lembaga pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi minimal "B"	91.00	Persen	91.00	Persen	100%	100%	0%	100%
		Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98.8	Persen	88.13	Persen	89%	89%	0%	89%
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, iklim keamanan sekolah, inklusivitas, dan kebhinekaan pada kategori baik	70	Persen	75	Persen	107%	107%	0%	107%
										888%
									88.80%	
									BB	

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berikut akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja:

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel ini menunjukkan rata-rata capaian sasaran adalah **83,00 persen**, maka berdasarkan kategorisasi pencapaian kinerja dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut "Berhasil". Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

1) Presentase Guru bersertifikat pendidik

Tabel 3.4 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.1

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025					Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
			Target		Realisasi		% Capaian			
1.1	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	85.17	100	%	83.00	%	83.00%	83.00%	0%	75.00%
Total Capaian PK										75%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK										75.00%
Predikat PKO										B

Dari data di atas bahwa di Kota Banjarmasin jumlah guru yang bersertifikat pendidik mencapai target sebesar 83,00 % dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

2) Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang PAUD

Tabel 3.5 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.2

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025					Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
			Target		Realisasi		% Capaian			
1.2	Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang PAUD	12	9	%	9	%	100.00 %	100.00%	0%	100.00 %
Total Capaian PK										100%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK										100.00%
Predikat PKO										A

Dari data diatas bahwa di Kota Banjarmasin satu orang guru mengajar 12 orang murid jenjang PAUD. Berdasarkan Permendikbud no 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Rasio ideal Guru Terhadap Murid Jenjang PAUD dengan anak didik berusia 4-6 Tahun, yakni untuk jenjang Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK), Rasio guru dan anak maksimal 1:15. Artinya, satu orang guru KB ataupun TK sebaiknya tidak melayani lebih dari 15 orang anak didik. Realisasi ini telah mencapai target sebesar 9,00% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

3) Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang SD

Tabel 3.6 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.3

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025					Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
			Target		Realisasi		% Capaian			
1.3	Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang SD	16.4	16	%	7	%	44.00 %	44.00%	0%	44.00 %
Total Capaian PK										44%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK										44.00 %
Predikat PKO										BB

Berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah standar Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang SD maka jumlah maksimum adalah 28 peserta didik. Realisasi masih dibawah target dengan nilai 44,00 % dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

4) Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang SMP

Tabel 3.7 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.4

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025					Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
			Target		Realisasi		% Capaian			
1.4	Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang SMP	15.65	14.8	%	6	%	41.00%	41.00%	0%	41.00%
Total Capaian PK										41%

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK	41.00%
Predikat PKO	C

Berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah standar Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang SMP maka jumlah maksimum adalah 32 peserta didik. Realisasi masih dibawah target sebesar 41,00 % dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

5) Rasio Sekolah Terhadap Murid Jenjang PAUD

Tabel 3.8 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.5

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025				Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK	
			Target		Realisasi					% Capaian
1.5	Rasio Sekolah Terhadap Murid Jenjang PAUD	40.75	42	%	32.71	%	78.00 %	78.00%	0%	78.00 %
Total Capaian PK									78%	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK									78.00 %	
Predikat PKO									B	

Dari data diatas bahwa di Kota Banjarmasin bahwa rasio sekolah terhadap murid jenjang PAUD, yaitu jumlah sekolah pada tahun 2025 sebanyak 464 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 15.177 peserta didik. Sehingga rasio sekolah terhadap murid jenjang PAUD mencapai target sebesar 78 % dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Perhitungan tersebut diperoleh dari jumlah sekolah PAUD di

kota Banjarmasin sebanyak 464 sekolah yang berbanding dengan jumlah peserta didik jenjang PAUD yang dilayani di Kota Banjarmasin sebanyak 15.177 peserta didik.

6) Rasio Sekolah Terhadap Murid Jenjang SD

Tabel 3.9 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.6

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025				Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK	
			Target		Realisasi					% Capaian
1.6	Rasio Sekolah Terhadap Murid Jenjang SD	209.1	218.1	%	192	%	88.00 %	88.00%	0%	88.00 %
Total Capaian PK									88%	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK									88.00 %	
Predikat PKO									BB	

Dari data diatas bahwa di Kota Banjarmasin bahwa rasio sekolah terhadap murid jenjang SD yaitu data yang diperoleh dari aplikasi dapodik tahun 2025, dengan rasio jumlah sekolah jenjang SD sebanyak 261 sekolah berbanding jumlah siswa sebanyak 50.188 peserta didik. Sehingga mencapai target sebesar 88 % dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

7) Rasio Sekolah Terhadap Murid Jenjang SMP

Tabel 3.10 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.7

			Capaian Kinerja Tahun 2025	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi	Nilai Akhir
--	--	--	----------------------------	------------------------	---------------------	-------------

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target		Realisasi		% Capaian		Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Capaian PK
1.7	Rasio Sekolah Terhadap Murid Jenjang SMP	350.13	304	%	351	%	115.00%	110.00%	0%	110.00%
Total Capaian PK										110%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK										110.00%
Predikat PKO										A

Dari data diatas bahwa di Kota Banjarmasin bahwa rasio sekolah terhadap murid jenjang SMP yaitu data yang diperoleh dari aplikasi dapodik tahun 2025, dengan rasio jumlah sekolah jenjang SMP sebanyak 62 sekolah berbanding jumlah siswa sebanyak 21.780 peserta didik. Sehingga mencapai target sebesar 115% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

8) Harapan Lama Sekolah

Tabel 3.11 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1.8

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025					Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
			Target		Realisasi		% Capaian			
1.8	Harapan Lama Sekolah	14.01	14.01	Tahun	14.02	Tahun	100.00%	100.00%	0%	100.00%
Total Capaian PK										100%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK										100.00%
Predikat PKO										A

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak

tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut diatas adalah dengan meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan salah satunya yaitu dengan meningkatkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam melaksanakan pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, Paket C dan Keaksaraan Fungsional pada masyarakat dan membuka pelatihan keahlian untuk masyarakat di sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan PKBM yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin.

9) Angka Partisipasi Kasar

Tabel 3.12 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.1

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025					Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
			Target	Realisasi	% Capaian					
2.1	Angka Partisipasi Kasar									
	- PAUD	105	88.00	%	83	%	94%	94%	0%	94%
	- SD/MI	101	100.00	%	103	%	103%	103.00%	0%	103.00%
	- SMP/MTs	108	100.00	%	102	%	102.00%	102%	0%	102%

Total Capaian PK	299%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK	100%
Predikat PKO	A

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Berdasarkan pada tabel diatas, rata-rata capaian angka partisipasi kasar adalah 94% untuk APK PAUD atau realisasi sebesar 83% dari target sebesar 88%, APK SD dari target sebesar 100% dan realisasi sebesar 103%, untuk capaian APK SMP sebesar 102% dari yang telah ditarget sebesar 100% pada target Perjanjian Kinerja (PK). Capaian perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 melebihi capaian diatas 100% diantaranya dikarenakan adanya kenaikan target dan dibarengi dengan meningkatnya jumlah siswa SD dari tahun sebelumnya, dan juga terjadi kenaikan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APK SMP juga mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan adanya kenaikan target dan dibarengi dengan daya tampung sekolah yang mencukupi untuk siswa SMP dari tahun sebelumnya, dan juga terjadi kenaikan jumlah penduduk usia 13-15 tahun, mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%, dikarenakan populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, pada sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD yang seharusnya masih bersekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk menaikkan angka partisipasi Kasar (APK) didasarkan pada penambahan ruang kelas, penambahan sarana prasarana pendukungnya untuk setiap jenjang pendidikan selain itu juga melakukan perbaikan segala sarana dan prasarana yang ada sehingga setiap ada penerimaan siswa baru dapat tertampung dengan maksimal dan setiap peserta didik mendapat fasilitas sesuai dengan SPM. Proses penerimaan siswa baru juga dilaksanakan dengan sistem *online* sehingga kualitas peserta didik baru dapat dipertahankan dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kota Banjarmasin. Akan tetapi pada jenjang pendidikan SMP masih terdapat APK yang rendah untuk lingkup kecamatan dimana belum meratanya jumlah SMP pada masing-masing kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin.

10) Angka partisipasi murni (APM)

Tabel 3.13 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.2

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025				Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
			Target	Realisasi	% Capaian				
2.2	Angka Partisipasi Murni								
	- PAUD	101.1	75.00 %	59.2 %	79%		79%	0%	79%
	- SD/MI	91.62	100.00 %	95.2 %	95%		95.00%	0%	95.00 %
	- SMP/MTs	78.72	78.00 %	81.8 %	105.00 %		105%	0%	105%
Total Capaian PK									279%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK									93%
Predikat PKO									BB



Angka Partisipasi Murni untuk usia sekolah adalah jenjang pendidikan tertentu sesuai usia sekolah pada jenjang tersebut. Apabila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai

nilai 100. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tentunya tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun. Jika dilihat dari tabel 3.12 di atas realisasi capaian pada setiap jenjang pendidikan PAUD sebesar 79%. Untuk Tingkat SD tahun 2025 sebesar 95% dan masih belum memenuhi target akhir Perjanjian Kinerja APM tingkat SD yaitu 100,00% sedangkan realisasi APM tingkat SD yaitu 95%. Selanjutnya APM untuk jenjang SMP/MTs realisasinya 81,8% dengan hasil capaian sebesar 105%, capaian tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja yaitu 78%. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terus berupaya untuk meningkatkan APM dengan menerapkan program dan kegiatan yang tepat di tingkat PAUD, SD/SMP Negeri dan Swasta, melakukan pembangunan Sekolah baru, penambahan ruang kelas, rehabilitasi sedang/berat sekolah dan ruang kelas, pembenahan manajemen sekolah dengan sistem MBS (manajemen berbasis sekolah) serta menerapkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada seluruh sekolah tingkat dasar (SD/SMP).

11) Angka rata – rata lama sekolah

Tabel 3.14 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.3

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024						Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
		Target		Realisasi		% Capaian				
2.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10.35	10	Tahun	10.36	Tahun	104%	104%	0	104%
Total Capaian PK										104%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK										104%
Predikat PKO										A

Angka Rata-rata Lama Sekolah digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal pada suatu daerah, tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Dilihat pada tabel diatas capaian kinerja sebesar 104 persen, dengan realisasi angka rata-rata lama sekolah sebesar 10,36 tahun sehingga sudah melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.



12) Persentasi Pencapaian Akreditasi B

Tabel 3.15 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2.4

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025						Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
		Target 2024		Realisasi		% Capaian				
3.1	Persentasi Pencapaian Akreditasi B									

- SD	98	64	%	90	%	141%	110%	0%	110%
- SMP	98.38	91	%	100	%	110%	110%	0%	110%
Total Capaian PK									220%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK									110%
Predikat PKO									A

Dari target yang ditetapkan di perjanjian kinerja untuk pencapaian sekolah berakreditasi B untuk SD yang di targetkan 64% dari jumlah seluruh sekolah dasar yang ada di Kota Banjarmasin pada tahun 2025 terealisasi sebesar 90% dari target yang ditetapkan untuk Sekolah Dasar yang sudah mencapai nilai minimal akreditasi B, sedangkan untuk sekolah menengah pertama yang di targetkan 91,00% pada tahun 2025 dari jumlah sekolah menengah pertama yang ada di Kota Banjarmasin, realisasi nya mencapai 100% sekolah yang sudah mendapatkan akreditasi dan ini melebihi dari target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya target antara lain:

- a. Ambang batas nilai untuk mencapai nilai B lebih mudah dijangkau oleh satuan pendidikan.
- b. Pihak sekolah sudah siap dalam mengikuti proses akreditasi oleh tim BASN.
- c. Pola pendampingan yang baik dari pihak yang terlibat dalam proses akreditasi, baik pengawas, assesor, dinas pendidikan maupun lembaga akreditasi (BASN).
- d. Banyaknya sumber referensi terkait proses akreditasi, hingga memudahkan sekolah dalam mempelajari dan mempersiapkan diri menjelang proses akreditasi.

1) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Tabel 3.16 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1

Capaian Kinerja Tahun 2025	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK	Nilai Akhir
-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian		berdasarkan predikat AKIP	Capaian PK
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	10.50	Tahun	14.02	Tahun	134%	110.00%	0%	99.00%
Total Capaian PK									99%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK									99.00%
Predikat PKO									BB

Sumber : <https://www.bps.go.id/assets/statistics-table/2/NDE3IzI=-metode-baru--harapan-lama-sekolah.html>

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam satuan tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Secara sederhana, HLS menggambarkan peluang seorang anak untuk mengenyam pendidikan formal dari mulai masuk sekolah hingga jenjang tertinggi yang mungkin dicapai. Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2025 mengenai HLS, indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan realisasi sebesar 14.02 tahun, melampaui target yang ditetapkan yaitu 10.50 tahun atau setara dengan capaian 134%. Meskipun secara fisik melampaui target, setelah dilakukan proses normalisasi, Nilai Akhir Capaian PK ditetapkan sebesar 99.00%, yang kemudian menjadi angka rata-rata Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Dengan nilai ini, dinas Pendidikan mendapatkan nilai Predikat PKO dengan klasifikasi BB.

2) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Tabel 3.17 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 2

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025			Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
		Target	Realisasi	% Capaian			

2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	14.03	Tahun	10.36	Tahun	73.84%	74.00%	0%	74.00%
Total Capaian PK									74%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK									74.00%
Predikat PKO									C

Sumber : <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=-/metode-baru--rata-rata-lama-sekolah--tahun-.html>

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia yang menghitung jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. Singkatnya, angka ini menggambarkan tingkat literasi dan jenjang pendidikan yang berhasil dituntaskan oleh masyarakat dalam suatu wilayah. Berdasarkan data pada tabel, target RLS yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah **14.03 tahun**—yang setara dengan tingkat pendidikan Diploma IV atau Strata 1. Namun, realisasi yang tercapai berada di angka **10.36 tahun**, yang berarti rata-rata penduduk di wilayah tersebut baru menamatkan pendidikan hingga tingkat kelas 1 atau 2 SMA/Sederajat. Ketimpangan antara target dan realisasi ini menghasilkan persentase capaian sebesar **73.84%**, yang kemudian dinormalisasi menjadi **74.00%** sehingga dapat disimpulkan kinerja dalam upaya meningkatkan durasi pendidikan masyarakat masih masuk dalam kategori "Cukup" namun memerlukan evaluasi mendalam. Diperlukan langkah strategis yang lebih progresif untuk mendorong partisipasi pendidikan di jenjang yang lebih tinggi agar target di masa mendatang dapat terpenuhi dengan lebih optimal.

3) Rapor Pendidikan Kota Banjarmasin

Tabel 3.18 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 3

Capaian Kinerja Tahun 2025			
-----------------------------------	--	--	--

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
3	Rapor Pendidikan Kota Banjarmasin	81.14	Persen	81.14	Persen	100.00%	100.00%	0%	100.00%
Total Capaian PK									100%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK									100.00%
Predikat PKO									A

Sumber : <https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id/>

Rapor Pendidikan adalah platform digital yang menyajikan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan dari Rapor Mutu sebelumnya. Instrumen ini mengintegrasikan berbagai data dari Asesmen Nasional (AN), Dapodik, serta survei lingkungan belajar untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas input, proses, dan output pembelajaran di suatu daerah. Secara mendasar, Rapor Pendidikan berfungsi sebagai "cermin" bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi akar masalah pendidikan dan menentukan prioritas perbaikan yang berbasis data, bukan sekadar asumsi.

Berdasarkan data tabel, Pemerintah Kota Banjarmasin berhasil mencapai target kinerja secara sempurna. Target yang ditetapkan sebesar **81.14%** berhasil direalisasikan tepat di angka **81.14%**, sehingga menghasilkan persentase capaian mutlak sebesar **100.00%**. Konsistensi antara target dan realisasi ini menunjukkan perencanaan yang sangat akurat dan eksekusi program yang efektif di lapangan. Dengan nilai akhir capaian (NKO) sebesar 100.00%, organisasi ini berhak mendapatkan **Predikat PKO: A**, yang menandakan kualitas tata kelola pendidikan di Banjarmasin berada pada level istimewa dan telah memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dengan sangat baik.

- 4) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

Tabel 3.19 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 4

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025					Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
		Target		Realisasi		% Capaian			
4	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	96.00	Persen	88.13	Persen	91.80%	92.00%	0%	92.00%
Total Capaian PK									92%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK									92.00%
Predikat PKO									BB

Sumber : <https://datadik.kemendikdasmen.go.id/>

Indikator Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar merupakan ukuran kunci untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah mampu menjamin hak dasar anak dalam mengakses pendidikan formal di jenjang SD dan SMP (Wajib Belajar 9 Tahun). Indikator ini menghitung proporsi anak usia sekolah yang benar-benar terdaftar dan aktif mengikuti pembelajaran dibandingkan dengan total populasi penduduk di kelompok usia tersebut. Angka partisipasi yang tinggi menjadi bukti keberhasilan program-program seperti bantuan biaya pendidikan, pemerataan akses sekolah, hingga efektivitas penanganan anak putus sekolah di suatu wilayah.

Berdasarkan data pada tabel, target partisipasi pendidikan dasar tahun 2025 ditetapkan sangat tinggi sebesar 96,00%, dan untuk realisasi yang tercapai di lapangan adalah 88,13%. Ketimpangan ini menghasilkan persentase capaian sebesar 91,80%, yang kemudian dibulatkan melalui normalisasi menjadi 92,00%. Dengan tidak adanya koreksi normalisasi, nilai akhir capaian kinerja (NKO) ditetapkan sebesar 92,00%. Hasil ini menempatkan pada Predikat PKO: BB, yang menunjukkan kategori kinerja "Sangat Baik". Meskipun belum mencapai target maksimal, capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat

dalam memastikan hampir seluruh anak usia sekolah di wilayah tersebut telah mendapatkan akses pendidikan dasar yang layak.

- 5) Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, iklim keamanan sekolah, inklusivitas, dan kebhinekaan pada kategori baik

Tabel 3.20 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 5

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025					Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
		Target		Realisasi		% Capaian			
5	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, iklim keamanan sekolah, inklusivitas, dan kebhinekaan pada kategori baik	72.00	Persen	75	Persen	104.17%	104.00%	0%	104.00%
Total Capaian PK									104%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK									104.00%
Predikat PKO									A

Sumber : <https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id/>

Indikator ini mengukur kualitas ekosistem pendidikan di luar aspek kognitif, yang mencakup empat pilar utama : indeks karakter (perilaku dan nilai moral siswa), iklim keamanan sekolah (perlindungan dari perundungan dan kekerasan), inklusivitas (penerimaan terhadap siswa berkebutuhan khusus), serta kebhinekaan (toleransi dan moderasi beragama). Secara mendasar, indikator ini mencerminkan keberhasilan sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menghargai perbedaan. Angka

ini didapat dari hasil Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) yang melibatkan kepala sekolah dan guru sebagai bagian dari rangkaian Asesmen Nasional. Berdasarkan data pada tabel, kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat melampaui ekspektasi. Dari target yang ditetapkan sebesar 72,00%, dan berhasil merealisasikan angka sebesar 75%. Hal ini menghasilkan persentase capaian yang luar biasa sebesar 104,17%, yang kemudian dinormalisasi menjadi 104,00%. Prestasi ini menempatkan pada Predikat PKO: A, yang menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di kota Banjarmasin telah berhasil melampaui standar kualitas lingkungan belajar yang diharapkan dan menunjukkan tren positif dalam pembentukan karakter serta iklim sekolah yang sehat.

6) Persentase pemenuhan SPM Pendidikan

Tabel 3.21 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 6

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025					Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
		Target		Realisasi		% Capaian			
6	Persentase pemenuhan SPM pendidikan	74.00	Persen	81.14	Persen	110%	110.00%	0%	110.00%
Total Capaian PK									110%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK									110.00%
Predikat PKO									A

Sumber : <https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id/>

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Maksud dari indikator ini adalah mengukur sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi standar teknis yang meliputi ketersediaan sarana prasarana sekolah, kecukupan jumlah serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, hingga penjaminan mutu kurikulum. Keberhasilan pemenuhan

SPM menjadi tolok ukur utama bahwa negara hadir untuk memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan terstandar.

Berdasarkan data pada tabel, capaian kinerja untuk indikator ini sangat memuaskan dan melampaui ekspektasi perencanaan. Dari target awal yang ditetapkan sebesar 74,00%, organisasi berhasil merealisasikan capaian hingga 81,14%. Secara kalkulasi kinerja, angka ini menghasilkan persentase capaian sebesar 110,00% setelah proses normalisasi. Dengan nilai akhir capaian (NKO) yang mencapai 110,00% dan tanpa adanya koreksi negatif, dan memperoleh Predikat PKO: A. Hasil ini mengindikasikan bahwa upaya akselerasi pemenuhan standar pendidikan di kota Banjarmasin tersebut berjalan sangat efektif, melampaui target yang diproyeksikan, dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap peningkatan kualitas layanan publik di sektor pendidikan.

7) Rata-rata nilai literasi dan numerasi peserta didik jenjang SD/SMP

Tabel 3.22 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 7

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025					Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
		Target		Realisasi		% Capaian			
7	Rata-rata nilai literasi dan numerasi peserta didik jenjang SD/SMP	68.00	Skor	71.7	Skor	105.44%	105.00%	0%	105.00%
Total Capaian PK									105%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK									105.00%
Predikat PKO									A

Sumber : <https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id/>

Data ini menyoroti pencapaian indikator kinerja "**Rata-rata nilai literasi dan numerasi peserta didik jenjang SD/SMP**". Pada tahun 2025, target yang ditetapkan untuk skor literasi dan numerasi adalah sebesar 68,00. Realisasi

ini berhasil dicapai di lapangan menyentuh angka 71,7. Hal ini menunjukkan adanya tren positif dalam kualitas kompetensi dasar siswa melampaui ekspektasi yang telah direncanakan sebelumnya.

Secara kuantitatif, efektivitas kinerja ini tercermin dalam nilai persentase capaian sebesar 105,44%. Dengan menunjukkan bahwa nilai akhir capaian Perjanjian Kinerja (PK) di angka 105,00%.

Keberhasilan melampaui target ini memberikan kontribusi signifikan terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang secara keseluruhan tercatat sebesar 105,00%. Dengan hasil di atas ambang batas maksimal, organisasi berhak menyandang Predikat PKO "A". Hal ini menegaskan bahwa strategi penguatan literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar telah berjalan dengan sangat efektif dan efisien sepanjang tahun 2025.

8) Persentase pendidik atau tenaga pendidikan yang mendapat sertifikasi

Tabel 3.23 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 8

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025					Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
		Target		Realisasi		% Capaian			
8	Persentase pendidik atau tenaga pendidikan yang mendapat sertifikasi	80.00	Persen	83.00	Persen	104.00%	104.00%	104%	104.00%
Total Capaian PK									104%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK									104.00%
Predikat PKO									A

Sumber : <https://datadik.kemendikdasmen.go.id/>

Laporan kinerja tahun 2025 mencatat hasil yang sangat memuaskan pada indikator "**Persentase pendidik atau tenaga kependidikan yang mendapat sertifikasi**". Target yang telah ditetapkan sebesar 80,00%, namun melalui upaya fasilitasi program sertifikasi, realisasi yang berhasil dicapai menyentuh angka 83,00%. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam

meningkatkan legalitas profesionalisme tenaga pendidik di lingkungan dinas Pendidikan kota Banjarmasin.

Dilihat dari sisi efektivitas, indikator ini mencatatkan persentase capaian sebesar 104,00%. Angka ini mencerminkan bahwa target yang direncanakan tidak hanya terpenuhi, tetapi berhasil dilampaui secara signifikan.

Keberhasilan melampaui target sertifikasi ini menjadi salah satu pilar utama dalam mendongkrak Nilai Kinerja Organisasi (NKO) menjadi 104,00%. Dengan hasil yang melampaui standar 100% ini, organisasi secara sah memperoleh Predikat PKO "A". Hal ini membuktikan bahwa manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam hal peningkatan kualifikasi tenaga pendidik, telah dijalankan dengan strategi yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.

- 9) Persentase lembaga pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi minimal "B"

Tabel 3.24 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 10

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025					Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
		Target		Realisasi		% Capaian			
10	Persentase lembaga pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi minimal "B"	91.00	Persen	91.00	Persen	100.00%	100.00%	0%	100.00%
Total Capaian PK									100%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK									100.00%
Predikat PKO									A

Sumber : <https://datadik.kemendikdasmen.go.id/>

Laporan kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat akurat dan tepat sasaran pada indikator "**Persentase lembaga pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi minimal 'B'**". Dinas Pendidikan menetapkan target yang cukup ambisius sebesar 91,00%, dan pada akhir periode, realisasi yang tercatat

berhasil menyentuh angka yang sama persis yaitu 91,00%. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program pendampingan dan penjaminan mutu sekolah yang dilakukan secara konsisten, sehingga seluruh target yang direncanakan dapat terpenuhi sepenuhnya.

Ketepatan realisasi terhadap target tersebut menghasilkan persentase capaian sebesar 100,00%, yang juga menjadi nilai akhir capaian Perjanjian Kinerja (PK). Dengan capaian yang stabil dan sempurna ini, Dinas Pendidikan berhasil mempertahankan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di angka 100,00% dengan Predikat PKO "A". Hal ini membuktikan bahwa Dinas Pendidikan memiliki perencanaan yang matang dan kontrol yang baik dalam memastikan lembaga pendidikan memenuhi standar kelayakan kualitas nasional.

- 10) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

Tabel 3.25 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 11

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025					Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
		Target		Realisasi		% Capaian			
11	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98.80	Persen	88.13	Persen	89.20%	89.00%	0%	89.00%
Total Capaian PK									89%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK									89.00%
Predikat PKO									BB

Sumber : <https://datadik.kemendikdasmen.go.id/>

Untuk indikator tingkat partisipasi pendidikan dasar menunjukkan hasil yang signifikan. Target yang ditetapkan berada pada angka yang cukup tinggi, yaitu 98,80%, dan realisasi yang dicapai sebesar 88,13%. Ketimpangan antara target

dan realisasi ini menyebabkan persentase capaian berada di angka 89,20% dan menghasilkan nilai akhir capaian Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 89,00%. Capaian akhir sebesar 89,00% ini menempatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada kategori Predikat PKO "BB". Meskipun angka partisipasi sudah cukup baik secara umum, namun belum mampu memenuhi ambang batas optimal yang direncanakan di awal tahun. Hasil ini menjadi indikasi perlunya evaluasi mendalam terkait hambatan akses pendidikan bagi anak usia 7-15 tahun, guna menyusun strategi yang lebih efektif agar target partisipasi pendidikan dasar dapat tercapai secara maksimal pada periode mendatang.

- 11) Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, iklim keamanan sekolah, inklusivitas, dan kebhinekaan pada kategori baik

Tabel 3.26 Persentase Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 12

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025					Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
		Target		Realisasi		% Capaian			
12	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, iklim keamanan sekolah, inklusivitas, dan kebhinekaan pada kategori baik	70.00	Persen	75.00	Persen	107.14%	107.00%	0%	107.00%
Total Capaian PK									107%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK									107.00%
Predikat PKO									A

Sumber : <https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id/>

Pada indikator lingkungan belajar dan penguatan karakter. Target yang ditetapkan untuk satuan pendidikan yang mencapai kategori "Baik" dalam aspek karakter, keamanan, inklusivitas, dan kebhinekaan adalah sebesar 70,00%. Melalui berbagai program dan kampanye sekolah ramah anak, realisasi aktual yang dicapai hingga 75,00%. Keberhasilan ini menandakan bahwa sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan kota Banjarmasin tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga telah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan harmonis.

Secara administratif, performa ini menghasilkan persentase capaian sebesar 107,14%. Hasil yang melampaui target ini memberikan kontribusi besar terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO), sehingga Dinas Pendidikan berhak mendapatkan Predikat PKO "A". Capaian ini menjadi bukti nyata kesuksesan Dinas Pendidikan dalam menginternalisasi nilai-nilai kebhinekaan dan keamanan di lingkungan pendidikan.

2. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target RPJMD Tahun 2024

INDIKTOR KINERJA UTAMA		TARGET RPJMD 2025		REALISASI PK 2025	
1.1	Harapan Lama Sekolah	13,94-14,00	Tahun	14,02	Tahun
1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,97-10,00	Tahun	10,36	Tahun

3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Tersedianya sumber daya aparatur kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan

tuntutan dan kebutuhan pembangunan, Hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada yang siap untuk menjalani tantangan pembangunan pendidikan. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan representatif yang siap untuk menghadapi tantangan perkembangan IPTEK dan dunia Global, hal ini dapat dilihat dari asset yang dimiliki baik berupa gedung perkantoran gedung persekolahan, mesin-mesin, perbengkelan, jaringan internet (LAN) dan yang lainnya serta didukung dengan operator-operator yang handal dan terampil. Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat kota, kecamatan sampai sekolah. Siap melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan sampai kepada penyelenggaraan teknis pembelajaran.

4. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2025

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Segala upaya penyelenggaraan layanan pendidikan di daerah perlu ditunjang dengan program dan kegiatan yang diharapkan menambah dan memperkuat pencapaian target program kegiatan. Tata kelola administrasi perkantoran juga sangatlah penting dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Untuk tercapainya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja SKPD dalam hal ini pada Dinas Pendidikan, maka diperlukanlah kegiatan-kegiatan penunjang diantaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Pengelolaan Pendidikan

Pendidikan dasar merupakan jembatan menuju pendidikan menengah. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar menjadi penting untuk difokuskan pada penguatan pelaku pendidikan yaitu siswa, guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.

Peningkatan jaminan bagi lulusan SMP/MTs untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah, Peran Pemerintah adalah salah satu kunci keberhasilan dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan terutama di daerah masing-masing.

Demikian juga halnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dengan fokus utama pada pembentukan karakter dan pengenalan lingkungan sekitarnya. PAUD merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan pada jenjang selanjutnya. Oleh karenanya, peningkatan akses PAUD terutama untuk masyarakat miskin, pemenuhan standar pelayanan PAUD, dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik integratif perlu diagendakan pada periode pembangunan pendidikan ke depan.

3. Program Pengembangan Kurikulum

Peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru antara lain dihasilkan oleh penerapan sistem uji kompetensi guru; penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan mempertimbangkan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu serta Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan. Selanjutnya penerapan sistem penjaminan mutu menjadi kunci dalam menjamin kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan

tenaga kependidikan menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Sementara itu, peningkatan mutu layanan pendidikan oleh LPTK bertujuan untuk melakukan reformasi LPTK secara menyeluruh dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan, melibatkan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru, penjaminan mutu calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan merit system, memaksimalkan pelaksanaan program induksi dan mentoring guru, mengembangkan kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan aktual serta melaksanakan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru melalui pola beasiswa dan berasrama.

Selain menindaklanjuti kurikulum yang ditetapkan pemerintah pusat, daerah juga ditantang untuk dapat membuat kurikulum pendukung yang bersifat kedaerahan/kearifan lokal tanpa terlepas dari koridor pembuatan kurikulum yang seharusnya. Kurikulum ini dinamakan kurikulum muatan lokal.

4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Peran penting pendidik (Guru) dan tenaga kependidikan (PTK) dalam satuan pendidikan tidak bisa disepelekan. Namun yang tidak kalah penting selain kualitas pendidik dan tenaga kependidikan adalah bagaimana ketersediaan dan pendistribusian untuk pemerataan PTK di satuan-satuan pendidikan. Keterpenuhan akan PTK masih menjadi pekerjaan rumah bagi daerah, terutama untuk memenuhi standar sesuai yang seharusnya.

Untuk itulah diperlukan upaya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan guna menunjang tata kelola Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan di daerah. Di samping itu yang tidak kalah penting adalah pemberian layanan bagi PTK terkait peningkatan kompetensi dan kesejahteraan mereka (Sertifikasi).

5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Antusiasme dan keterlibatan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan di daerah perlu didukung oleh pemerintah. Namun masyarakat yang ingin mendirikan sekolah tetap perlu mengikuti aturan yang berlaku. Untuk itulah dinas pendidikan perlu berupaya memberikan pengendalian dan perizinan pendidikan.

Adapun beberapa tujuan dari adanya program seperti ini adalah agar dapat memudahkan pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan serta agar terpeliharanya serta meningkatnya mutu sebuah satuan pendidikan agar tercapat tujuan pendidikan. Disamping itu agar satuan pendidikan juga terlindungi dari penyalahgunaan wewenang, hak dan kewajiban dan yang paling penting adalah melindungi konsumen yang dalam hal ini adalah peserta didik yang mengenyam pendidikan di lembaga tersebut.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2025 untuk Belanja adalah sebesar **Rp 724.002.835.794,00** dimana angka serapannya sebesar **Rp 530.744.529.130,00** dengan silpa sebesar **Rp 193.259.039.049,00**, secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun 2024 mencapai 73,31 persen untuk keuangan, hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu

- Ada beberapa pekerjaan yang tidak cukup waktu untuk pengerjaan
- Ada kegiatan yang serupa sehingga dilaksanakan di salah satu sub kegiatannya
- Ada kegiatan yang telah dilaksanakan dengan berbasis online seperti kegiatan perlombaan
- Adanya pengadaan yang tidak dilaksanakan karena masih terpenuhi ditahun sebelumnya
- Dan adanya efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mengamankan ruang fiskal guna membiayai

program-program prioritas nasional (seperti Program Makan Bergizi Gratis)

Untuk lebih detail serapan anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel 3.17 dibawah ini:

Tabel 3.28 Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2025

NO	URAIAN PROGRAM	NILAI DPA	KEUANGAN	
			REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 420.188.133.050	Rp 270.200.269.573	64,30
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 298.805.814.468	Rp 256.314.832.388	85,78
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp 2.686.458.000	Rp 2.415.760.767	89,92
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp 2.001,598.400	Rp 1.689.926.402	84,43
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp 320.831.876	Rp 0	00,00
Jumlah		Rp 724.002.835.794	Rp 530.744.529.130	73,31

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, kewajiban dan rasa tanggungjawab, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) didunia pendidikan. LKj Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2025 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari 5 (lima) program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2025 adalah sebesar 88,80% Dari sebanyak 12 Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2025 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja Keuangan Dinas Pendidikan tahun 2025 adalah sebesar 73,31%. Dari sebanyak 5 program Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, sebanyak 3 program dengan capaian kinerja keuangannya sangat berhasil, 1 program dengan capaian kinerja keuangannya cukup berhasil, dan 1 program dengan capaian kinerja keuangannya kurang berhasil.

Beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan antara lain pengimplementasian kurikulum merdeka, peningkatan akses dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan menengah, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan assisment nasional (AN) yang lebih berkualitas, penerimaan peserta didik baru, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta penyebaran guru yang belum merata. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian

dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan dapat mendukung misi dari kepala daerah yakni ***Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.***

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2025 sebesar **73,31 persen** dengan nominal **Rp. 530,744,529,130,00** dari total anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 724,002,835,794,00** Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, untuk rata-rata capaian Kinerja Sasaran pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2025 bisa dikatakan cukup berhasil, sedangkan efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2024 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil dari pada yang ditargetkan. Banjarmasin sudah sangat berhasil dan efisien dengan realisasi anggaran sebesar **73,31%**.

Pada masa yang akan datang diharapkan perencanaan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan semakin matang dengan segala indikator yang lebih smart.

Lampiran-Lampiran
